

PERAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK SISWA DI SMA ASSA'ADAH BUNGAH GRESIK

Awalin Faridhoh

13040254074 (PPKn, FISH, UNESA)awalinfaridhoh1994@gmail.com

Muhammad Turhan Yani

002121003 (PPKn, FISH, UNESA) mturhanyaniyani@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: mendeskripsikan peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Assa'adah Bungah Gresik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran Biddle and Thomas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Untuk informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SMA Assa', Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan dan Siswa SMA Assa'adah Bungah Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah sebagai komponen terpenting pendidikan pada dasarnya dapat di jadikan sebagai pendidikan politik untuk menumbuhkan kesadaran politik generasi bangsa melalui melalui berbagai macam bentuk program pendidikan politik baik melalui mata pelajaran PKn, kegiatan OSIS maupun bentuk kegiatan lain yang terencana ataupun yang bersifat insidental yang bermaksud untuk memberikan informasi politik kepada siswa.

Kata Kunci: Peran Sekolah, Kesadaran Politik Siswa

Abstract

The purpose of this study are to describe the school's role to improve the student political awareness at Assa'adah Senior High School, Bungah Gresik. The theory used in this research is he role theory of Biddle and Thomas. This research uses qualitative approach with descriptive research type with purposive sampling technique For informants in this study were high school principals of Assa'adah Bungah gresik, school principals, vice principals in the Curriculum section, vice principals of Student Affairs and Assa'adah Bungah High School Gresik students. The results show that schools as the most important component of education can basically be used as political education to foster political awareness of the nation's generation through various forms of political education programs either through civic education subjects, intra-school student orientation activities or other planned activities or incidental which intends to provide political information to students.

Keywords: Role of School, Student Political Awareness

PENDAHULUAN

Perberlakuan Undang-Undang Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menurut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikan wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 Standar Nasional Pendidikan, juga adanya tuntutan globalisasi di digantungkan terutama di usia SMA. bidang pendidikan yang mengacu agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju (Kunandar, 2007:13).

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesantuan Republiik Indonesia adalah Negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah Negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda agama, ras, etnik atau golongan (kurikulum pendidikan kewarganegaraan, 2004).

Dalam perkembangan sejak proklamai 17 agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke 20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya (peristiwa Malari tahun 1974

dan peristiwa kerusuhan Mei 1998). Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa (Pradhanawati, 2009:214).

Menurut Norris, (1999:152) Generasi muda pada masa pemerintahan Orde Baru kurang mendapatkan ruang untuk menikmati alam demokrasi yang sesungguhnya dan tidak dapat menggunakan hak-hak politik sebagai warga negara. Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah dan organisasi-organisasi non pemerintah perlu dikenal, dimulai, diinternalisasikan dan diharapkan demi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia.

Demokrasi dalam suatu Negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga Negara yang demokratis. Warga Negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang lebih cerah. Sesungguhnya kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamankan oleh para pendiri bangsa dan Negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945 (Sapiro,2004:23)

Berkenaan dengan hal tersebut, sekolah memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga Negara yang memiliki komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan siswa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda saat ini memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan lajunya pemerintahan. Para siswa dapat dikatakan sebagai tulang punggung Negara karena di pundak merekalah masa depan bangsa ini akan

Di Sekolah anak diajarkan beberapa mata pelajaran sebagai dasar penunjang kecerdasan. Mata pelajaran yang diajarkan oleh guru memiliki peran masing-masing. Mata pelajaran yang sangat penting untuk wawasan tentang kenegaraan utamanya wawasan tentang politik. Mislakan, mata pelajaran PPKn di sekolah, siswa diajarkan mengenai rasa nilai-nilai yang

berkaitan dengan politik negara. Politik mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang memiliki wawasan tentang keadaan politik negara. Dalam lingkup sekolah siswa dikenalkan cara menyalurkan pendapat serta menjadi sosok kepemimpinan yang baik untuk sebuah Negara. Dalam hal ini program sekolah sangatlah berperan. Bukan hanya Pelajaran PKN bisa juga kegiatan lain yang mendukung beberapa nilai yang diberikan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran politik siswa terutama siswa SMA

Masa SMA merupakan masa yang usianya masih bisa dikatakan masih labil. Akan tetapi, pada usia ini masa-masa yang paling menentukan dalam proses pendidikan seorang individu karena dalam usia ini mereka mencoba menyerap berbagai konsep keilmuan dan mengaplikasikan secara langsung dalam masyarakat. Dalam usia tersebut, seorang individu sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan berbagai aspek yang dimiliki, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Oleh karena itu, pada usia ini sangat mudah untuk menanamkan konsep tentang hal yang baru. Konsep yg diserap tersebut termasuk juga di dalamnya adalah berbagai konsep mengenai politik. Hal ini menjadi penting agar kelak mereka tidak buta politik dan menjadi sasaran pembodohan politik, karena pada dasarnya usia SMA ini merupakan jumlah yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai target untuk mengambil suara dari pemilih pemula dalam sebuah kegiatan politik seperti pemilu. Maka dari itu sangatlah relevan dunia pendidikan bisa menjadi basis yang strategis untuk menaikkan pamor politik. Maka tidak heran jika para caleg berupaya meraih simpati dari kalangan siswa apa lagi sekolah yang ada dalam yayasan.

Sejatinya sudah ada larangan beraktivitas politik atau kampanye di lembaga pendidikan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Namun dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, para pelaku politik praktis ini tetap melakukan aktivitas politik di lingkungan sekolah meski dengan cara terselubung. Bagaimanapun bentuknya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kampanye politik merupakan bentuk paparan yang telah mengarah pada politik praktis. Paparan dan ancaman propaganda politik yang semakin besar ini generasi muda harus lebih dibekali moral dan pengetahuan yang baik tentang politik.

Selama menuntut ilmu di bangku sekolah, para siswa tampaknya tidak pernah mendapatkan pendidikan politik dengan benar. Hal ini dapat dilihat bahwa pembelajaran politik secara langsung ditengah-tengah kehidupan masyarakat melalui media dapat dikatakan

jauh dari pendidikan politik yang ideal. Penanaman konsep politik pada usia SMA sangat penting agar mereka tidak mendapat konsep politik yang keliru dan salah tentang politik. Pentingnya pendidikan politik melalui sekolah pada masa remaja sangat menentukan tingginya tingkat kesadaran politik seseorang. Semakin awal seorang individu mendapat pembelajaran tentang politik maka semakin tinggi kesadarannya untuk berkenaan ikut berpartisipasi langsung dan mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai warga Negara yang baik.

Davidson Easton (Sirozi, 2005:49) mengatakan bahwa “salah satu kondisi fundamental untuk mempertahankan suatu sistem politik adalah ketika generasi muda dalam suatu masyarakat menginjak dewasa, mereka harus menguasai ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap sebagaimana diharapkan oleh para anggota dan sistem yang ada”. Berdasarkan pendapat David Easton tersebut, terlepas dari keadaan sistem politik baik atau buruk, jika sistem tersebut ingin tetap berlanjut, maka dalam artian luas sistem tersebut harus mampu mendidik anggota masyarakatnya, terutama generasi muda untuk memainkan peran-peran tertentu yang diharapkan dari mereka.

Sekolah dalam hal ini memegang peranan penting untuk dapat mendidik generasi muda agar dapat memberikan pendidikan politik. Sehingga siswa mendapat pemahaman yang jelas terhadap berbagai konsep dan simbol politik, terutama dalam membentuk kesadaran politiknya. Kesadaran politik itu menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga Negara masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiarjo, 1982:22). Semakin kuat pendidikan politik dalam masyarakat maka kesadaran politiknya juga semakin kuat (Theresia Audita Guretti, 2009). Sehingga dengan adanya kesadaran politik, diharapkan ada pemilihan sistem yang berpegang erat pada Pancasila dan mengusahakan kesejahteraan bersama. Dan ketika tingkat kesadaran politik masyarakat sudah tinggi, maka niscaya dengan sendirinya sistem demokrasi akan berjalan, dengan tentunya menjadi sangat penting untuk di bangun, karena tanpanya kesadaran politik yang kritis tidak mungkin ditumbuhkan (M. Khoiron, 1999:51)

Namun demikian sebuah kesadaran politik yang dimiliki seseorang tidak datang dengan sendirinya namun melalui proses panjang. Walaupun keluarga, media massa, dan pengalaman politik turut menentukan proses pembentukan kesadaran politik seseorang,

namun peranan lembaga-lembaga pendidikan pun tidak bisa dikesampingkan. Proses tersebut dapat diperoleh melalui berbagai jalur pendidikan baik itu jalur formal maupun jalur informal. Dalam jalur formal, yaitu melalui sekolah, seorang individu dapat lebih mudah mengenal dan mengetahui konsep-konsep tentang politik karena telah direncanakan dan telah disusun secara terperinci melalui kurikulum yang ada.

Kurikulum di persekolahan sebagai komponen terpenting pendidikan, pada dasarnya dapat dijadikan media pendidikan politik untuk menanamkan dan membentuk tumbuhnya kesadaran politik. Hal ini didasarkan dari sumber utama pembentukan politik di lembaga pendidikan tersebut. Sudijono Sastromodjo (1995:27) memberikan komentarnya mengenai hubungan pendidikan dengan tingkat kesadaran politik seseorang sebagai berikut: “Tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik”. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat menjadi makin tinggi tingkat kesadaran politiknya. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka makin rendah pula tingkat kesadaran politik masyarakat”.

Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan politik yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui kegiatan disekolah, yaitu kegiatan intra, ekstra kurikuler dan program kesiswaan. Kegiatan intrakurikuler itu sendiri dalam bentuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (*citizenship*). Mata pelajaran ini memiliki tujuan yang baik yaitu mendidik siswanya agar dapat menjadi warga negara sesuai harapan. Idealnya adalah menjadi warga Negara yang baik. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yakni kegiatan siswa diluar kelas termasuk kegiatan, PMR, Pramuka. Kemudian program kesiswaan yaitu seperti Organisasi siswa intra sekolah (OSIS).

Sekolah mengadakan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan program kesiswaan sebagai bentuk pendidikan politik dalam rangka peran sekolah untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. Hal ini bisa dilihat pendidikan politik disekolah seperti: pelajaran pendidikan kewarganegaraan, antara siswa dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan di tingkat SLTA khususnya di SMA As-Sa'adah Bungah Gresik sesuai dengan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) sangat memungkinkan siswa

mendapatkan pengetahuan politik sejak dini sebagai pemilih pemula dalam pemilu. Standar kompetensi yang diajarkan kepada siswa kelas X, kelas XI dan XII melalui pendidikan kewarganegaraan meliputi: hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menghargai persamaan kedudukan warga Negara dalam berbagai aspek kehidupan dan sistem politik.

dan mereka sangat butuh juga karena dilihat berbagai macam golongan guru yang diikuti berbeda. Akan tetapi dalam hal ini bukan hanya lewat pelajaran pendidikan kewarganegaraan, tapi juga lewat kegiatan ekstrakurikuler, dan program kesiswaan yaitu OSIS. Dari situ awalnya mereka diajari sikap dan adab dalam berorganisasi sampai pada menjadi seorang pemimpin. Kemudian terjun langsung berinteraksi dengan warga sekolah. Selain itu juga dengan adanya hal ini dapat memberikan wawasan bagi mereka kelak di luar sekolah jika terjun di lingkungan masyarakat dan berkecimpung dalam politik yang nyata.

Kesadaran politik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sadar adalah insaf, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti. Sedangkan kesadaran politik adalah kesadaran dan pengetahuan orang mengenai kekuatan politik di masyarakat.

kesadaran politik juga merupakan proses batin yang menampilkan keinsafan dari setiap warganegara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik atau keinsafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat begitu kompleks dan beratnya tugas yang dipikul negara dalam hal ini para penyelenggara negara. Kesadaran politik masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pemilihan umum. Akan tetapi diukur juga dari peran serta mereka dalam mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintah selama memegang kekuasaan pemerintahan. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda. Kesadaran politik masyarakat sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi cenderung mempunyai kesadaran politik yang relatif tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, maka kesadaran politiknya pun relatif rendah sehingga memerlukan pembinaan

Menurut Peter (ustman, 2000) kesadaran politik adalah berbagai pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Sedangkan Al-khumaisi (ustman, 2000)

mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang dimiliki individu yang meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan, lembaga, dan kepentingan politik baik dalam skala regional maupun internasional. Apabila kita lihat dari berbagai pendapat di atas maka kita akan mengetahui bahwa kesadaran politik mencakup hal-hal berikut: (a) Pandangan yang komprehensif, (b) Wawasan yang kritis, (c) Rasa tanggung jawab, (d) Keinginan untuk mengubah dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi berbagai problematika sosial.

Menurut Surbakti (2007:144) kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik.

Menurut Milbiath (2001:143) mengatakan bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negarabai individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat didefinisikan bahwa kesadaran politik merupakan kondisi tanggap mengerti tentang hal yang mencakup wawasan/ pengetahuan politik, nilai-nilai dan orientasi politik yang memungkinkan seseorang untuk mengerti situasi, kondisi problematika masyarakatnya, memecahkannya, memberikan kepurusan dan menentukan pendirian terhadapnya, yang mendorongnya untuk bergerak dalam rangka merubah atau mengembangkannya.

Untuk mengukur kesadaran politik, indikator yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: (1) Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, (2) Kesadaran perlunya pemerintah yang legitimate/ sah, (3) Kesadaran perlunya mengikuti perkembangan informasi politik, (4) Kesadaran perlunya mengikuti kegiatan politik.

Kemudian selama kegiatan observasi awal yang telah dilakukan di SMA Assa'adah Bungah, menunjukkan jelas bahwa di SMA Assa'adah Bungah Gresik merupakan salah satu sekolah yang peduli pada kesadaran politik siswa. Hal ini karena melihat keadaan sekolah yang para gurunya terikat pada partai politik yang berbeda-beda. Sehingga untuk kedewasaan politik sangat diperhatikan. Bertujuan agar tidak berdampak negatif terhadap nilai-nilai yang berikan guru kepada siswa saat mengajar dikelas.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, perlu dicari peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa. Sehingga peneliti akan menggunakan teori peran dari Bidle and Thomas sebagai acuan teori dasar penelitian. Menurut Bidle and

Thomas istilah “peran” diambil dari dunia teater dimana dalam dunia teater, terdapat aktor dan target. “Aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya itu seorang aktor diharapkan untuk berperilaku secara tertentu”, (Suwono, 2015:215). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam satu peran terdapat perilaku yang diharapkan dari seseorang di mana perilaku tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

Dalam teori Biddle and Thomas dalam (Sarwono, 2015:215), menyebutkan bahwa terdapat 4 peristilahan dalam teori peran, yaitu istilah-istilah yang sebagai berikut:

Istilah tentang Orang-Orang

Orang yang mengambil bagian dalam peran ini dibagi menjadi dua golongan yaitu: (1) “Aktor (*Actor*, pelaku) yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu” (Sarwono, 2015:216). Dalam penelitian ini yang memiliki posisi sebagai aktor adalah SMA Assa’adah Bungah Gresik. Peran yang diharapkan dari aktor adalah meningkatkan kesadaran politik siswa. (2) “Target (sasaran) atau orang lain (*Other*) yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya” (Sarwono, 2015:216). Dalam penelitian ini target adalah siswa di SMA Assa’adah Bungah Gresik. Target ini dipilih karena memiliki hubungannya sebagai subjek yang menerima proses dari dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di lingkungan sekolah.

Istilah tentang Perilaku

Expectation (Harapan)

“Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditujukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu” (Sarwono, 2015:217). Dalam penelitian ini, adanya lembaga pendidikan di SMA Assa’adah Bungah Gresik diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran politik siswa yaitu (1) **Norm (norma)** adalah Menurut Secord & Backman “norma” (dalam sarwono, 2015:217- 218) hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord and Backman adalah sebagai berikut: (a) Harapan yang bersifat meramalkan yaitu harapan tentang perilaku yang akan terjadi. Misalnya, jika siswa yang ada di lingkungan SMA Assa’adah Bungah Gresik diberikan pembinaan mengenai pentingnya politik siswa, maka siswa tersebut diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan dalam perilaku atau tindakannya. (b) Harapan normatif adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle and Thomas membagi lagi harapan

normatif ini ke dalam dua jenis: (1) Harapan yang terselubung merupakan harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. Misalnya, peningkatan kesadaran politik siswa diharapkan agar siswa memiliki kesadaran politik dalam dirinya, misalnya mengetahui pentingnya politik meskipun diingkung sekolah. (2) Harapan yang terbuka merupakan harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Misalnya, dalam hal ini Depdiknas (Departemen Pendidikan nasional) memberikan tanggung jawab seluruh lembaga pendidikan untuk dapat meningkatkan kesadaran politik siswa.

Performance (wujud perilaku)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata, bukan sekedar harapan. Selain itu, berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Dalam penelitian ini, wujud perilaku dari meningkatkan kesadaran politik siswa banyak bentuknya. Hal ini dikarenakan di setiap lembaga pendidikan memiliki cara masing-masing dalam menyampaikannya dan mengaplikasikannya.

Evaluation (penilaian) dan sanction sanksi

Biddle and Thomas mengatakan bahwa “penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negative terhadap suatu perilaku” (dalam sarwono, 2015:220). Kesan positif atau negative inilah yang dinamakan penilaian peran. Namun, pihak lain yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negative bisa menjadi positif. Dalam penelitian ini penilaian dan sanksi akan dilakukan oleh siswa yang menerima segala bentuk pengajaran dan kebijakan yang ada di sekolah kaitannya dengan peningkatan kesadaran politik siswa. Penilaian dari siswa ini diharapkan akan memberikan suatu gambaran dari peran yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa. Maka Kesadaran siswa dalam mengetahui, memahami dan berperilaku dalam hal politik. Maka peran sekolah berkaitan dengan apa yang diterima oleh siswa sebagai bentuk kesadaran politik siswa. Sehingga muncul sebuah rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Assa’adah Bungah Gresik?

Manfaat secara teoritis, hasil Penelitian ini merupakan informasi bagi siswa, sebagai tambahan pengetahuan mengenai politik dimana para siswa yang

belum mengerti politik maka akan dapat memahaminya, untuk mengetahui peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa terhadap siswa dan siswa juga dapat berperan aktif dalam kegiatan pendidikan politik yang terdapat di sekolah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi siswa untuk bisa menjadi lebih baik dalam menjalani hidup dalam kalangan politik yang akan datang.

Kemudian untuk manfaat secara praktis penelitian ini Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan di masa yang akan datang. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah maupun partai politik agar senantiasa memberikan pendidikan politik khususnya bagi para siswa SLTA/SMA sehingga perilaku politik dari para siswa didasarkan pada pendidikan politik yang cerdas, rasional dan tidak menyesatkan.

Berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu untuk menunjukkan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini, Pada penelitian pertama adalah penelitian Wildan Nurul Fajar (2010) yang berjudul Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Purwokerto, fokus penelitiannya adalah pada pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran politik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah menjelaskan bahwa Sekolah sebagai komponen terpenting pendidikan pada dasarnya dapat dijadikan media pendidikan politik untuk menanamkan kesadaran politik generasi bangsa melalui berbagai macam bentuk program pendidikan politik baik melalui mata pelajaran PKn, kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, maupun bentuk kegiatan yang terencana ataupun yang bersifat insidental yang bermaksud untuk memberikan informasi politik kepada siswa.

Sedangkan pada penelitian kedua yang dilakukan oleh J.W. Betawi (2013) dengan judul meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula (studi kasus pilkada kabupaten Halmahera timur provinsi maluku utara), dengan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bahwa Tingkat kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada menunjukkan perbedaan yang didasarkan pada pemahaman dan pengalaman belajar konsep berpolitik di tingkat persekolahan. Sedangkan 60 persen menunjukkan siswa senang terdaftar sebagai pemilih pemula dalam Pilkada. Sebagai pemilih pemula, siswa dihadapkan pada persoalan psikologis yaitu penempatan jati diri dan pemahaman belajar politik yang dipengaruhi oleh teman sejawat di persekolahan.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Werpen Wenda (2014), dengan judul peran kesadaran politik pemilih pemula dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten lannya provinsi papua (Studi di Distrik Prime), dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa tingkat kesadaran politik pemilih pemula yang ada di distrik prime kabupaten lannya jaya masih dipengaruhi oleh kebiasaan ataupun sekedar ikut-ikutan saja., penerus khususnya yang ada didaerah. Oleh karena itu, kesadaran politik masyarakat masih ditentukan oleh pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, khususnya pemilih pemula. Sarana-sarana, intensitas pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, menentukan kesadaran pemilih pemula untuk memberikan hak suaranya dengan benar.

Kemudian perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah fokus pada peran sekolah melalui kegiatan sekolah yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler melalui pendidikan kewarganegaraan dan ekstrakurikuler dan OSIS. Perbedaan obyek penelitian dalam penelitian ini lebih pada siswa SMA Assa'adah kelas XI yang mengikuti OSIS selaku bapak ibu guru yang sesuai pilihan peneliti. Kelebihan dalam penelitian ini adalah belum ada penelitian tentang Peran sekolah yang fokus pada meningkatkan kesadaran politik siswa. Selain itu sebagai pengetahuan penambahan wawasan akan kegiatan sekolah juga melakukan kegiatan dalam meningkatkan kesadaran politik sebagai bentuk penanaman karakter anak didik agar berlaku sesuai dengan hak dan kewajibannya atas politik yang ada dan sadar akan politik.

Selain itu juga pada saat observasi awal telah disampaikan oleh Bapak Drs. M. Ibrahim M.Pd :

“...SMA Assa'adah Bungah Gresik ini adalah yayasan yang sekolahnya terdiri dari berbagai tingkat dan tinggal dalam satu lokasi sehingga tentu gurunya berasal dari berbagai golongan partai assda PKB, P3k, Golkar, demokrat, PDI dan lainnya. Oleh karena itu kesadaran politik bagi siswa sangat perlu karena terkadang pada saat tertentu sesuatu yang tidak diinginkan akan disampaikan oleh setiap guru dengan pendapat tertentu terutama pada saat pemilihan. Karena itulah sangat perlu namanya kesadaran politik yang baik dan benar. Bukan hanya lewat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan namun dari kegiatan ekstrakurikuler OSIS dan MPK sangat membantu dalam rangka meningkatkan kesadaran politik siswa”. (Ibrahim, 28 desember 2016).

Berdasarkan penelitian awal yang didapat oleh peneliti menunjukkan jelas bahwa di SMA Assa'adah Bungah Gresik memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran politik siswa. Kesadaran politik siswa tidak hadir dengan sendirinya melainkan melalui beberapa proses yang panjang. Walaupun keluarga, media massa, dan pengalaman politik turut menentukan proses pembentukan kesadaran politik seseorang, namun peran lembaga-lembaga pendidikan pun tidak dikesampingkan. Proses tersebut dapat diperoleh melalui berbagai jalur pendidikan baik itu jalur formal maupun jalur informal. Dalam jalur formal, yaitu melalui jalur persekolahan, seorang individu dapat lebih mengenal dan mengetahui konsep-konsep tentang politik karena telah direncanakan dan telah disusun secara terperinci melalui kurikulum yang ada.

Kurikulum di persekolahan sebagai komponen terpenting dalam pendidikan, pada dasarnya dapat dijadikan media pendidikan politik untuk menanamkan dan membentuk tumbuhnya kesadaran politik. Hal ini didasarkan dari sumber utama pembentukan kurikulum di lembaga pendidikan tersebut. Sastroatmodjo (1995: 27) memberikan komentarnya mengenai hubungan pendidikan dengan tingkat kesadaran politik seseorang sebagai berikut:

Tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat menjadi makin tinggi kesadaran politiknya. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka makin rendah pula tingkat kesadaran politik masyarakat.

Siswa mendapat pengetahuan dan pemahaman politik disekolah melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua mata pelajaran memiliki tujuan yang baik yaitu mendidik siswanya agar dapat menjadi warga Negara sesuai harapan. Namun pada dasarnya mata pelajaran yang secara khusus mendidik siswa untuk menjadi warga Negara yang baik diberikan kepada pendidikan kewarganegaraan karena materi yang termuat didalamnya banyak tentang politik. Sekolah dengan berbagai erangkatnya antara lain kurikulum, buku-buku teks, metode pengajaran, organisasi-organisasi yang ada di sekolah, lingkungan kelas dan lainnya yang terkait tentang orientasi politik. Orientasi politik fundamental biasanya terbentuk dalam usia dini. Orientasi politik yang terbentuk pada usia tersebut akan berakar sangat kuat dan terus berlanjut sepanjang hayat, terkecuali jika terdapat lingkungan sangat kuat yang mempengaruhi individu tersebut.

Aspek kesadaran politik bukan hanya meliputi aspek kognitif saja namun juga harus melibatkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, mata

pelajaran pendidikan kewarganegaraan dianggap tepat karena secara langsung mampu member fasilitas yang lengkap bagi siswa untuk dapat mengembangkannya ketiga aspek tersebut dalam memahami berbagai konsep tentang politik.

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka penulis merasa perlu untuk merumuskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Assa'adah Bungah Gresik". Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kejadian-kejadian secara konkret tentang keadaan objek atau masalah. Menurut Nasution (dalam Seoiono:19) mengatakan bahwa "metode penelitian deskriptif dalam kajian metodologi penelitian selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, akan digambarkan perilaku pencarian informasi berikut sumber dan sarana-sarannya. Pembahasan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian kata-kata (deskripsi).

Dari penjelasan di atas maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dikarenakan sumber data utama penelitian berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Penelitian deskriptif dipilih dikarenakan penelitian bermaksud untuk mendeskripsikan proses peran guru sebagai pendidik dalam menumbuhkan sikap nasionalisme.

Alasan menggunakan jenis penelitian deskripsi karena dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan tentang peran. Yaitu mengetahui peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa.

Tempat dan waktu penelitian. Tempat dilakukan penelitian ini adalah sekolah SMA Assa'adah Bungah Gresik. Penelitian ini dilakukan selama sembilan bulan yakni mulai bulan November 2016 hingga bulan April 2017. Adapun waktu penelitiannya yakni mulai bulan Januari-Mei 2017 untuk observasi

(awal), dan bulan Juni-September 2017 penelitian (wawancara, observasi).

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan yang didasari oleh beberapa pertimbangan tertentu berdasarkan informasi awal yang diperoleh. Subjek penelitian ini Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, dan Guru PPKn SMA Assa'adah Bungah Gresik Kelas XI. Penetapan informan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan kerangka kerja penelitian. Dari subjek penelitian ini diperoleh informasi Peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa pada Kelas XI.

Maka untuk lebih spesifik untuk informan dalam penelitian ini sesuai dengan sumber dan kerangka penelitian dalam pemilihan informan sebagai berikut. Guru mata pelajaran PPKn kelas XI SMA Assa'adah Bungah Gresik. Kepala sekolah SMA Assa'adah Bungah Gresik. Mengambil beberapa informan dari guru sebagai pelaksana dalam belajar mengajar dan yang berperan aktif di SMA Assa'adah Bungah Gresik kelas XI guru PPKn dan Pembina OSIS SMA Assa'adah Bungah Gresik. Mengambil beberapa informan dari siswa-siswi SMA Assa'adah Bungah Gresik kelas XI (ketua OSIS) dan satu siswi.

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa. Dalam hal ini berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai yang diambil siswa dari setiap program yang diberikan siswa dalam meningkatkan kesadaran politik siswa.

Dalam penelitian kualitatif, Peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang sudah dipilih di sekolah SMA Assa'adah Bungah Gresik. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Adapun teknik yang pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Observasi non partisipan adalah kegiatan observasi tanpa terlibat dengan kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti hanya melakukan pengamatan apa yang dikerjakan oleh subjek penelitian. maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat

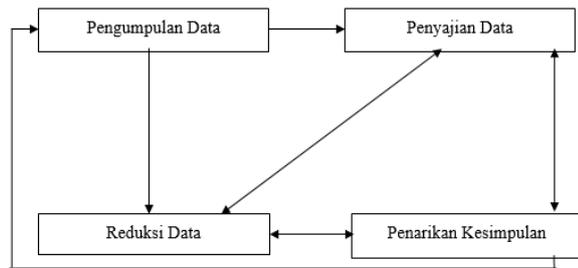
mana dari setiap perilaku yang nampak. Dalam kegiatan observasi ini di mulai dari lingkungan SMA Assa'adah Bungah untuk melihat bagaimana dan apa saja yang dilakukan pihak sekolah dan siswa kelas XI di Sekolah tersebut pada saat pembelajaran berlangsung maupun kegiatan yang memiliki unsur meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Assa'adah Bungah Gresik.

Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2011:186). Dengan metode wawancara maka didapatkan informasi tentang peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa, pelaksanaan, dan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami guru di SMA Assa'adah Bungah Gresik. Dalam penelitian informan yang diwawancarai yaitu: Guru PPKn kelas XI, Kepala Sekolah SMA Assa'adah Bungah Gresik dan Pembina OSIS, dan beberapa siswa kelas XI.

Dokumentasi (*documenter*) Metode dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan melengkapi data serta informasi tertulis dari informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil dokumentasi digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu mengenai peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Assa'adah. Adapun alasan menggunakan metode dokumentasi adalah: Lebih hemat tenaga, waktu dan biaya karena data sudah tersusun dengan baik.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Miles and Huberman (1984). Melalui teknik analisis ini akan digambarkan dengan jelas, sistematis dan rinci tentang hal-hal yang telah dirumuskan sebelumnya. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan proses penyederhana, mengabstrakan dan transformasi data kasar dari penelitian yang muncul di lapangan menurut Miles dan Huberman (1992:20). Pada penelitian ini, reduksi data berlangsung selama pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terbagi dalam langkah-langkah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan. Jika digambarkan ke dalam bentuk bagan, maka proses analisis data di dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Bagan 1
Proses Analisis Data Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono: 2015:92)

Dalam penelitian ini misalnya, data-data yang disajikan adalah informasi-informasi yang berasal dari catatan-catatan di lapangan. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif. Alur kegiatan terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Miles dan Huberman penarikan data yang dikumpulkan direduksi dan disajikan perlu juga diverifikasi atau penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di Kelas XI. Untuk menjamin keabsahan data temuan yang diperoleh dalam Penelitian dari menanyakan langsung kepada obyek, data juga diperoleh dari sumber lain. Pada penelitian peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Assa'adah Bungah Gresik untuk memperoleh keabsahan data, teknik yang di gunakan adalah Triangulasi sumber.

Untuk pengecekan keabsahan data hasil penelitian dilakukan melalui triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2015:127), Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari teknik wawancara dapat dicek dengan teknik observasi maupun dokumentasi agar penelitian dapat diakui kebenarannya. Kemudian bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain sehingga akan dihasilkan kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan penelitian tentang peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Assa'adah Bungah Gresik. Dalam penelitian ini ditemukan peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa melalui pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran politik siswa.

Pemberian Pendidikan Politik di Sekolah

Sekolah dalam realitasnya selain mengutamakan keagamaan juga mengutamakan pendidikan secara keseluruhan. Dalam hal ini khususnya mengenai pemberian pendidikan politik di sekolah melalui beberapa program yang dibuat oleh sekolah. Tujuan pemberian pendidikan politik ini nanti bisa meningkatkan kesadaran politik siswa.

Pernyataan ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bpk. Drs. Muh. Ibrahim M.Pd.I selaku kepala Sekolah di SMA Assa'adah Bungah Gresik berikut ini:

"...Jadi begini mbak. Persoalan kesadaran politik ini sangat erat dengan pelajaran politik. saya kir di sekolah ini bisa dilihat pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena di dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan mereka diajarkan persoalan politik". (Drs. Bpk. Drs. Muh. Ibrahim M.Pd, 25 Maret 2018)

Berdasarkan petikan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ibrahim selaku kepala sekolah menyatakan bahwa pemberian pendidikan politik di sekolah dapat membantu siswa dalam meningkatkan kesadaran politik siswa.

Selanjutnya pernyataan yang diungkapkan oleh Syaiful Hadi S.Pd., mengenai pemberian pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik siswa menyatakan bahwa:

"...Begini mbak menurut saya untuk pendidikan politik disini selain adanya pendidikan kewarganegaraan juga di dukung oleh kegiatan kesiswaan yaitu OSIS. Hal ini karena menurut saya OSIS ini akan membina siswa mengenai kepemimpinan dan bagaimana cara menjalankan roda organisasi". (Syaiful Hadi S.Pd. 25 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaiful Hadi menyatakan bahwa pemberian pendidikan politik kepada siswa sangat tepat untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. Pendidikan politik di sekolah tidak hanya melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan tapi juga bisa melalui kegiatan kesiswaan yaitu OSIS.

Hal yang lain juga dinyatakan oleh Bapak Hamim S.H. selaku guru mata pelajaran PPKn kelas XI menyatakan bahwa:

"... Persoalan mengenai realitas peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik ini tak lain yaitu melalui pendidikan politik mbak Pendidikan politik ini diperoleh anak-anak dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dari pelajaran itu nanti anak-anak dapat memahami politik itu seperti apa dan bagaimana. Dari situ nanti para siswa dapat memahami politik. Saya

disini selaku guru pendidikan kewarganegaraan selain berpedoman pada materi juga pada metode yang akan diberikan pada siswa".(Hamim S.H, 25 Maret 2018)

Berdasarkan pernyataan Bapak Hamim S.H. bahwa pemberian pendidikan politik adalah hal yang tepat. Karena adanya pendidikan politik mengakibatkan adanya kesadaran politik.

Hal yang sama di nyatakan oleh ibu Nur Indah Rahmawati S.Pd, selaku guru mata pelajaran PPKn kelas XI menyatakan :

"...Begini mbak berkenaan dengan kesadaran politik siswa ini tak jauh berkaitan dengan pendidikan politik yang diadakan oleh sekolah. Pendidikan politik ini jika di sekolah adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Hal ini karena lewat pendidikan kewarganegaraan ini mereka kan tahu dan mempelajari mengenai politik karena ada beberapa materi yang akan disampaikan yang membahas persoalan politik. Semisal pemilu dan mengenai sistem politik. Selain itu juga ada metode pengajaran yang diberikan guru yang nanti akan bisa membentuk sikap siswa sehingga mampu berbicara di depan dan bisa berpikir kritis".(Nur Indah Rahmawati S.Pd, 25 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa adalah dengan cara pemberian pendidikan politik kepada siswa melalui program sekolah. Program yang terencana dan terikat kurikulum atau tidak terikat oleh kurikulum. Dalam wawancara ini juga jelas ditegaskan pemberian pendidikan politik ini adalah sebagai bentuk sumber timbulnya kesadaran politik siswa.

Bentuk-bentuk pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik

Kemudian berkaitan dengan bentuk-bentuk pendidikan politik, ibu Nur indah Rahmawati S.Pd. menyatakan bahwa:

"...Mengenai bentuk pendidikan politik yang ada di sekolah ini. saya sesuai dengan bidang saya selaku guru pendidikan kewarganegaraan. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat membantu siswa dalam meningkatkan kesadaran politik siswa. Dalam hal ini berkaitan dengan materi yang disampaikan dari kelas X adalah mengenai Hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ada pula materi menghargai persamaan kedudukan warganegara dalam berbagai aspek kehidupan dan materi sistem politik di Indonesia. Pada kelas XI terdapat materi

potret budaya politik masyarakat Indonesia. mata pelajaran pkn berperan penting dalam menambah wawasan terkait dengan pendidikan politik. Kemudian untuk metode pelajaran lebih pada model pembelajaran yang variatif dan partisipatif. Dalam hal ini dengan model diskusi antar kelompok. Jadi ini nanti siswa dapat mengutarakan pendapatnya dan bisa saling bertukar pendapat antara satu kelompok dengan kelompok lain mengenai materi yang akan menjadi bahasan". (Nur indah Rahmawati S.Pd, 25 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Indah S.Pd., pendidikan politik diberikan melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi yang sesuai dengan kurikulum yang harus diajarkan. Misalkan kelas XI berarti yang diajarkan mengenai potret budaya politik masyarakat Indonesia. Kemudian mengenai metode pembelajaran yaitu dengan cara diskusi. Mereka di bentuk beberapa kelompok kemudian setiap kelompok menyampaikan pendapatnya dengan mendiskusikan mengenai isu-isu politik yang terjadi masyarakat pada saat itu.

Selanjutnya hal yang sama disampaikan Bapak Hamim S.H. selaku guru pelajaran pendidikan kewarganegaraan, menyatakan bahwa:

"...Mengenai materi dan metode dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena ini lebih pada kelas XI materi yang di sampaikan adalah persoalan potret budaya politik masyarakat Indonesia. Untuk metode pelajaran pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah dengan bervariasi bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Bisa dibilang metode pembelajaran yang saya terapkan adalah simulasi. Jadi disini saya bertujuan agar mereka tidak hanya membaca dan mendengar tapi juga mempraktekan". (Hamim S.H., 25 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak hamim menyatakan bahwa untuk metode pembelajaran yang disampaikan saat mengajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan bukan hanya dengan diskusi. Tapi bisa juga dengan cara simulasi di luar kelas. Hal ini dikarena menurut beliau dari situ siswa bisa langsung praktek apa yang disampaikan dalam kelas.

Hal yang lain disampaikan oleh Bapak Syaiful Hadi S.Pd selaku wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan Pembina OSIS. Terkait bentuk pendidikan politik selain pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Assa'adah bungah Gresik.

“...Pendidikan politik yang ada di sekolah salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Tapi dalam hal ini, saya lebih pada kegiatan kesiswaan yang tak lain adalah kegiatan OSIS. Dalam OSIS ini anak-anak diajarkan beberapa cara kepemimpinan yang baik. Hal ini bisa dilihat ketika mereka mencalonkan sebagai kandidat ketua OSIS. Mereka diwajibkan untuk mempromosikan dirinya di depan teman-temannya. Jadi seminggu sebelum acara pemilihan mereka saling beradu mengambil hati para pemilih untuk jadi ketua”.(Syaiful Hadi S.Pd, 25 Maret 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pendidikan politik di sekolah tidak hanya melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan tapi juga melalui kegiatan kesiswaan yaitu OSIS.kegiatan OSIS dirasa tepat untuk mengajarkan siswa dalam hal pelatihan mental sebagai bekal menjadi pemimpin. Misal, adanya kegiatan promis untuk kandidat ketua OSIS.

Hal yang samayang dinyatakan salah satu Anggota OSIS, Moh. Bryan anak siswa XI yang termasuk anggota OSIS:

“...OSIS adalah pembinaan untuk malthi kepemimpinan anak-anak. Cara kerjanya itu lewat bebrapa program yang diadakan OSIS.Jadi untuk pendidikan politik sudah jelas bisa dikatakan OISIS adalah bentuk nyata pendidikan politik yang ada di sekolah.Selain itu OSIS disini itu mb, selalu ada sosialisasi politik secara singkat dan insendtrial.Hal ini bisa dilihat ketika saya dan teman-teman menjelag pemilu ketua OSIS. Pertama kita kerjasama dengan kantor pemilu Gresik dalam rangka peminjaman kotak pemilu. Sebelum meminjam kita ada sosialisasi singkan dari mas Rahman selaku ketua yang memegang dan bertanggung jawab soal kotak emilu Gresik. Sebelum meminjam kita selalu diberi wawasan singkat untuk tahu tata cara pemilu yang baik seperti apa”.(Moh. Bryan anak siswa XI, 25 Maret 2018)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya kegiatan sosialisasi secara singkat yang dilakukan olehihak KPU Gresik ketika menjelang adanya pemilhan OSIS di sekolah.Adanya ini di anggap menguntungkan bagi sekolah karena adanya itu dapat membantu siswa terutama anak OSIS untuk mengerti sekilas tentang pemilu yang benar yang juga berkaitan dengan politik.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Kepala sekolah:

“...Untuk kerja sama dengan kantor pemilu Gresik ini dilakukan oleh sekolah selain

karena kotak pemilu sekolah belum ada juga sebagai bentuk sekolah agar siswa bisa tahu langsung dan kerja sama langsung dengan pihak kotak pemilu dan mereka diajarkakn oleh mereka tentang tata cara pemilu serta dijelaskan sedikit yang berbau politik. Kebetulan untuk ketua pemilunya adalah memnag alumni dari SMA Assa’adah Bungah Gresik.Bisa dikatakan gini mb, mereka memperoleh sosialisasi poitik secara singkat dari pihak sana”.(Muhammad Ibrahim M.Pd.I, 25 Maret 2018)

Hal lain lagi di sampaikan oleh Bapak Syaiful selaku Pembina OSIS:

“...Untuk bentuk nyata pembinaan OSIS bisa di wujudkan dalam kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) yang bertujuan memeberikan keterampilan kepemimpinan bagi siswa calon pengurus OSIS.Jadi ini berlaku untuk smeua pengurus OSIS, bukan hanya calon ketua OSIS”.(Syaiful Hadi S.Pd , 25 Maret 2018)

Sesuai petikan wawancara di atas diketahui bahwa OSIS adalah salah satu kegiatan yang mendukung adanya pendidikan politik melalui adanya acara latihan dasar kepemimpinan siswa (LDKS) yang diikuti oleh pada pengurus siswa. Adanya program ini bertujuan agar melatih siswa untuk memiliki jiwa kepemimpina.Jadi nilai yang diambil dalam hal ini adalah kepemimpinan.

Bedasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa pendidikan politik yang diberikan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran politik siswa dalam beberapa bentuk kegiatan sekolah yang telah dilaksanakan yaitu pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan materi dan metode pemeblajaran teretntu. Ada banyak matteri yang disampaikan dari kelas X-XII dan lebih khusus pada kealas XI yaitu mengenai Budaya di Indonesia.Metode pembelajaran yang diberikan sangat bervariasi dan parsipatif.Hal ini bisa dilakukan mellau ajang diskusi dengan materi yang diambil adalah materi yang lagi *up dates*aat ini kemudian di diskusikan secara berkelompok dan kemudian ditidak lanjuti denngan adanya saling tukar pendapat antar kelompok. Selain itu juga pemeblajaran tidak selalu monoton didalam kelas tapi juga bisa dilakukan diluar kelas dengan cara simulasi. Dalam kata lain bisa dikatakan cara pemeblajaran praktek langsung sesuai dengan teori yang diterima di kelas. Cara ini diharapkan guru agar siswa lebih mudah untuk mengerti dan paham mengenai materi yang disampaikan.

Selain pendidikan kewarganegaraan, OSIS juga merupakan pendidikan politik yang ada disekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran politik siswa. Hal ini terkait dengan jiwa kepemimpinan siswa. Di dalam OSIS ada beberapa kegiatan sebagai bentuk kegiatan kepemimpinan adalah kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa (OSIS) dan adanya kerjasama OSIS dengan pihak pemilu Gresik yang setiap kali menjelang waktu pemilihan mereka mendapatkan sosialisasi langsung dan singkat dari para pihak pemilu.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka pembahasan hasil penelitian ini akan menggunakan teori peran dari Bidle and Thomas sebagai analisis dalam membahas hasil penelitian. Ada beberapa istilah dalam teori peran dari Biddle and Thomas yaitu istilah tentang orang dan istilah tentang perilaku dalam peran. Istilah ini dibagi menjadi lima yaitu *expaction* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku nyata), *evaluation and sanction* (penilaian dan sanksi). Peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan sekolah melalui beberapa program yang ada disekolah. Dalam hal ini ada dua program yang ada yaitu intrakurikuler dan program kesiswaan. Masing-masing kegiatan ini antara lain adalah pendidikan kewarganegaraan dan Organisasi Intra Sekolah (OSIS).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Assa'adah Bungah Gresik yaitu dengan adanya dua hal, yaitu:

Pemberian Pendidikan Politik

Pemberian pendidikan politik dilakukan sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa. Hal ini dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sekolah yang dilaksanakan oleh siswa. Ada berbagai macam kegiatan dalam hal ini misalkan kegiatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, OSIS, PMR, Pramuka dan seterusnya. Berdasarkan teori Biddle and Thomas, terdapat dua kedudukan dalam peran yaitu kedudukan sebagai aktor dan kedudukan sebagai target. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa yang berkedudukan sebagai aktor adalah pihak sekolah yang membuat beberapa program sekolah. Program yang berdasarkan kurikulum atau program tambahan yang nama lainnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan kedudukan target disini adalah siswa SMA Assa'adah Bungah Gresik kelas XI dan yang mengikuti kegiatan OSIS.

Pertama, Biddle and Thomas mengungkapkan bahwa dalam suatu peran terdapat *expaction*

(harapan). *expaction* adalah harapan yang bersifat meramalkan yaitu harapan tentang perilaku yang akan terjadi. Dalam hal ini pihak sekolah berharap adanya pendidikan politik yang dilaksanakan akan berdampak pada sikap peserta didik. Seperti, sikap kepemimpinan, sikap disiplin, dan berikir kritis.

Kedua, berdasarkan teori Biddle and Thomas yaitu Norm (norma) jadi norma disitu merupakan salah satu bentuk harapan. Dalam hal ini menurut Scord and Backman harapan ada dua yaitu harapan yang bersifat meramalkan dan harapan normatif. Berdasarkan hal itu menunjukka bahwa segala kegiatan yang ada disekolah masih dalam pengawasan pihak sekolah. Contohnya kegiatan OSIS di SMA Assa'adah Bungah Gresik dalam binaan pihak kesiswaan.

Ketiga, SMA Assa'adah Bungah Gresik sebagai aktor harus menunjukkan perilaku nyata yang berkaitan tentang pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik siswa. Perwujudan perilaku dalam teori peran Biddle and Thomas termasuk dalam istilah *performance* (wujud perilaku nyata). Menurut hasil penelitian yang dilakukan bahwa *performance* yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pemberian pendidikan politik yaitu adanya kegiatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan OSIS.

Keempat, dalam Teori peran Biddle and Thomas disitu diungkapkan bahwa dalam suatu peran terdapat *evaluation* dan *sanction*. Biddle and Thomas mengatakan bahwa *evaluation* dan *sanction* didasarkan pada harapan seseorang tentang norma. Sesuai norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku yang diberikan. Kesan positif dan negatif inilah yang dinamakan penialain peran. Berdasarkan hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pemberian pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik siswa melalui kegiatan-kegiatan sekolah diawasi oleh pihak sekolah dan setiap kegiatan yang dilakukan dalam binaan guru yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk pendidikan politik

Pemberian pendidikan politik melalui dua kegiatan. Yaitu melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan OSIS. Berdasarkan teori Biddle and Thomas, terdapat dua kedudukan dalam peran yaitu kedudukan sebagai aktor dan kedudukan sebagai target. Adanya pemberian pendidikan politik, maka yang berkedudukan sebagai aktor disini adalah pihak sekolah yaitu guru pendidikan kewarganegaraan dan Pembina OSIS yang memberikan pendidikan lewat pendidik, sedangkan yang berkedudukan sebagai target adalah seluruh siswa yang belajar di lingkungan SMA Assa'adah Bungah Gresik.

Pertama, Biddle and Thomas mengungkapkan bahwa dalam suatu peran terdapat *expaction* (harapan). *expaction* adalah harapan yang bersifat meramalkan yaitu harapan tentang perilaku yang akan terjadi. Dari uraian tersebut jelas bahwa pernyataan pihak sekolah meskipun SMA Assa'adah Bungah Gresik adalah sekolah yang berbasis agama, namun mereka memperhatikan ilmu secara keseluruhan terutama mengenai pendidikan politik. Pendidikan politik ini adalah berkaitan dengan kesadaran politik siswa. Sehingga pendidikan politik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik siswa melalui pendidikan kewarganegaraan dan OSIS.

Kedua, berdasarkan teori Biddle and Thomas yaitu Norm (norma) jadi norma disitu merupakan salah satu bentuk harapan. Dalam hal ini menurut Scord and Backman harapan ada dua yaitu harapan yang bersifat meramalkan dan harapan normative. Berdasarkan penelitian yang diperoleh maka diketahui bahwa norma yang ada disini adalah bersangkutan mengenai perauran yang ditentukan oleh sekolah seperti pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam mengajar diikat oleh kurikulum yang dibuat oleh sekolah. Sehingga harapan sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa ini tercapai. Sedang untuk OSIS ini sudah jelas berjalannya program OSIS ini dibawa binaan dan tanggung jawab Pembina OSIS.

Ketiga, SMA Assa'adah Bungah Gresik sebagai aktor harus menunjukkan perilaku nyata yang berkaitan tentang pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik siswa. Perwujudan perilaku dalam teori peran Biddle and Thomas termasuk dalam istilah *performance* (wujud perilaku nyata). Menurut hasil penelitian yang dilakukan bahwa *performance* yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam memberikan pendidikan politik ini melalui dua hal yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan dan OSIS.

Terkait perwujudannya pendidikan kewarganegaraan adalah dengan adanya materi dan metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru pendidikan kewarganegaraan. Sasaran yang menjadi utama dalam penelitian di SMA Assa'adah Bungah Gresik adalah pada kelas XI yaitu materi yang disampaikan adalah mengenai budaya politik di Indonesia dan untuk metode yang diberikan adalah bervariasi dan partisipatif. Untuk metode pembelajaran bervariasi dan partisipatif disini di bentuk dalam belajar berkelompok dan diskusi. Jadi nanti semua kelompok diberi materi sesuai tema yang berkaitan dengan permasalahan politik yang baru update berdasarkan kondisi dan situasi yang ada di masyarakat. Kemudian mereka saling berdiskusi. Setelah diskusi itu dilakukan mereka

menyampaikan berkelompok dan saling bertukar pendapat antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Bukan hanya itu saja, telah disampaikan juga oleh bapak Hamim salah satu guru pendidikan kewarganegaraan yang menyatakan bahwa sekolah tidak hanya memberikan fasilitas belajar di dalam kelas saja, tetapi juga memberikan fasilitas belajar di luar sekolah. Dengan pembelajaran diluar kelas ini siswa belajar mempraktekan langsung teori yang didapat ketika pembelajaran di dalam kelas. Praktek tersebut bisa dilakukan dalam bentuk simulasi. Dengan melakukan simulasi siswa akan lebih faham dan menjadi lebih mengerti tentang materi yang diberikan.

Sedangkan untuk perwujudan pendidikan politik melalui OSIS yaitu adanya pembinaan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Pembina OSIS melalui kegiatan Latihan dasar kepemimpinan (LDKS) untuk pengurus OSIS. Selain itu juga adanya pemilihan ketua OSIS yang nanti akan di pilih untuk menjadi ketua OSIS dan memimpin OSIS dalam menjalankan segala program satu periodenya. Dalam pemilihan ini. Para kandidat diwajibkan untuk menyampaikan visi dan misinya sehingga bisa di dengar semua orang dan nanti akan dipih ketikan pemilihan ketua OSIS berlangsung. Dari situ dapat dilihat perwujudan adanya OSIS dapat membantu siswa untuk lebih kritis dan berani dalam menyampaikan apa yang menjadi tujuannya untuk masa kepemimpinannya. Nama lainnya mereka diajarkan bagaimana cara percaya diri untuk berbicara di depan umum sesuai pemikirannya.

Disamping itu OSIS juga bekerjasama dengan pihak pemilu Gresik sesuai dengan izin sekolah dikarenakan di sekolah juga belum ada kotak pemilu. Dalam peminjaman kotak pemilu ini ada yang namanya sosialisasi politik secara insidental yaitu sosialisasi yang dilakukan secara singkat tanpa perencanaan. Jadi beberapa pengurus OSIS ketika peminjaman kotak pemilu ke KPU Gresik sebelum satu hari peminjaman mereka di suruh untuk mendengar beberapa keterangan dan penjelasan mengenai pelaksanaan pemilu yang baik seperti apa. Jadi secara tidak langsung mereka mendapatkan pendidikan politik dalam sosialisais tersebut.

Keempat, dalam Teori peran Biddle and Thomas disitu diungkapkan bahwa dalam suatu peran terdapat *evaluation* dan *sanction*. Biddle and Thomas mengatakan bahwa *evaluation* dan *sanction* didasarkan pada harapan seseorang tentang norma. Sesuai norma itu orang memberikan kesan positif atau negative terhadap suatu perilaku yang diberikan. Kesan positif dan negatif inilah yang dinamakan penialain peran. Berdasarkan hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pemberian pendidikan politik dalam

meningkatkan kesadaran politik siswa melalui pendidikan kewarganegaraan dan OSIS. Terkait dengan ini maka bisa diketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan itu merupakan pendidikan politik yang direncanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan kurikulum yang ada. Sehingga untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini terikat oleh penilaian. Penilaian ini dilakukan sesuai dengan materi dan metode yang diterapkan oleh guru. Sehingga anak tertarik untuk mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Sedang untuk OSIS ini merupakan program kesiswaan yang juga termasuk program kesiswaan yang sangat menonjol di sekolah. Sehingga untuk penilaiannya akan lebih bisa dilihat oleh pihak sekolah dan siswa dari segi program yang dilaksanakan. Sehingga untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan harus sesuai dan berjalan sesuai dengan keinginan sekolah. Bukan hanya itu untuk penilaian dan sanksi ini juga termasuk keaktifan pengurus OSIS dalam OSIS. Semakin lincah pengurus OSIS dalam berbicara dan bersikap serta menjalankan semua programnya bisa dikatakan OSIS telah berhasil membentuk sikap anak. Dalam hal khusus mengenai politik yang ada di sekolah. Untuk sanksi OSIS ini langsung akan ditangani oleh pihak sekolah

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran politik siswa di SMA Assa'adah Bungah Gresik, ditemukan bahwa peran yang dilakukan sekolah yaitu pemberian pendidikan politik melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah tersebut di dalam meningkatkan kesadaran politik siswa dengan jalan memilih metode atau model pembelajaran yang tepat yang mana metode diskusi merupakan metode yang digunakan.

Kemudian untuk siswa di SMA Assa'adah Bungah Gresik diharapkan kemampuan berpikir kritisnya berada pada tingkat yang bagus menurut jajarannya guru sebagaimana dipertimbangkan melalui pengalaman belajar serta nilai-nilai yang diperoleh dari penugasan yang diberikan oleh guru PKn.

Saran

Menurut hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian memberikan saran bagi siswa yaitu (a) Hendaknya kemampuan untuk berpikir kritis pada siswa lebih ditingkatkan, (b) Di dalam kelompok diskusi hendaknya

siswa lebih berperan aktif dalam menyampaikan argument yang dimiliki sehingga tidak terpaku pada pendapat 1 atau 2 orang anggota kelompok saja.

Bagi guru yaitu (a) Sebelum menerapkan metode pembelajaran yang akan diterapkan, guru hendaknya lebih memahami secara mendalam tentang ciri dan strategi yang akan diterapkan. (b) Sebaiknya untuk model pembelajaran guru lebih bervariasi dalam upaya mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa dan tidak terpaku pada metode diskusi serta observasi lapangan. (c) Di dalam pembagian kelompok hendaknya guru lebih sering mengubah formasi susunan anggota kelompok. (d) Permasalahan yang disajikan hendaknya yang setara dengan taraf berpikir yang dimiliki, guru harus lebih pandai mengemas permasalahan yang menarik dan *up to date* sehingga siswa bisa lebih antusias

Bagi sekolah yaitu (a) Lebih memfasilitasi guru di dalam kegiatan pembelajaran terutama pada kegiatan diskusi kelompok. (b) Melengkapi serta memperbarui sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.

Bagi Peneliti lain yaitu (a) Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai acuan jika meneliti dengan tema dan topik yang sama. (b) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penelitian lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, YS. Chanigo. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Amal, Ichsanul dan Armady, 1988. *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*, Gajah Mada University Press.
- Alfian. 1986. *Pemikiran perubahan politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Budiarjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan partai politik (sebuah bunga Rampai)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA*. Jakarta: Erlangga
- Budiarjo, Miriam. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Citizens, Global Support for Democratic Governance*. Oxford: Oxford University Press
- Creswell, Jhon W. 2007. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Kunandar.2007. *Guru Profesi Dalam Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT Raja Garafindo.
- Miles, Mattheew B & A. Michel Huberman Michel. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodelogi Peneletian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. Nur Khoiron, dkk. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja)*. LKIS: Yogyakarta.
- Nurul Fajar, Wildan. 2010. *Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa Di SMA Purwokerto*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.1: hal.1-12.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurul Fajar, Wildan. 2010. *Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah dalam meningkatka kesadaran politik siswa di SMA Purwokerto*. Purwokerto.: Program Sarjana Universitas Purwokerto. Norris, P. (ed)(199). *Critical*
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta
- Permatasari, Vety Ika. 2015. *Kesadaran Politik Guru PPKn di Kabupaten Jombang*. Jurnal kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol.1: hal 180-194.
- Prdhanawati, Ari. 2009. *Pemilu dan demokrasi*. FISIP Undip. Semarang.
- Ruslan, Utsman Abdul Muis. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia
- Satromodjo, Sudjono. 1995. *Perilaku politik*. Semarang.: IKIP Press.
- Sirozi.M..2005. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Grafindo Persada
- Somantri, M .Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Reamaja Rosda Karya.
- Sindy, Silvia. 2013. *Peranan Sekolah Dalam Proses Sosialisasi Politik Kepada Siswa di SMP Ngeri 3 Batu*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 28: hal. 31-37
- Surbakti, Ramlan. 2001. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung: CV Alfabeta
- Undang-undang RepublikIndonesia No 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.2003, ([http://www. Dikti.org/UUno20th2003-Sisdiknas.htm](http://www.Dikti.org/UUno20th2003-Sisdiknas.htm)), diakses tanggal 10 november 2017.
- Wardhani, Diah. 2008. *Sarana Membangun Reputasi Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu